



**ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, *ICT DEVELOPMENT INDEX*, DAN *GOOD GOVERNANCE*
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA ANGGOTA
ASEAN DAN SAARC KATEGORI *LOWER-UPPER MEDIUM***

Albertus Surya Kristiawan¹, Deden Dinar Iskandar²
Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

¹albertussurya@students.undip.ac.id, ²dedeniskandar@lecturer.undip.ac.id

Abstract

The achievements of economic development can be seen in the success of human development. The Human Development Index in ASEAN and SAARC countries needs to be analyzed because it is still in the lower-upper medium category. This study aims to analyze the effect of the Gross Domestic Product, the ICT Development Index and the Worldwide Governance Indicators variable on the Human Development Index. The results showed that the variables of gross domestic product, ICT development Index, and political stability and absence of violence or terrorism have a positive and significant relationship, while control of corruption has a negative and significant relationship to the human development index in ASEAN countries and the lower SAARC category. Regulatory quality variable has a different relationship between the two regional organizations. In ASEAN the lower-upper medium category has a positive and significant relationship, while SAARC the lower-upper medium category has a negative and significant relationship.

Keywords: Human Development, ICT Development Index, good governance, Gross Domestic Product

JEL Classification: O4, O3

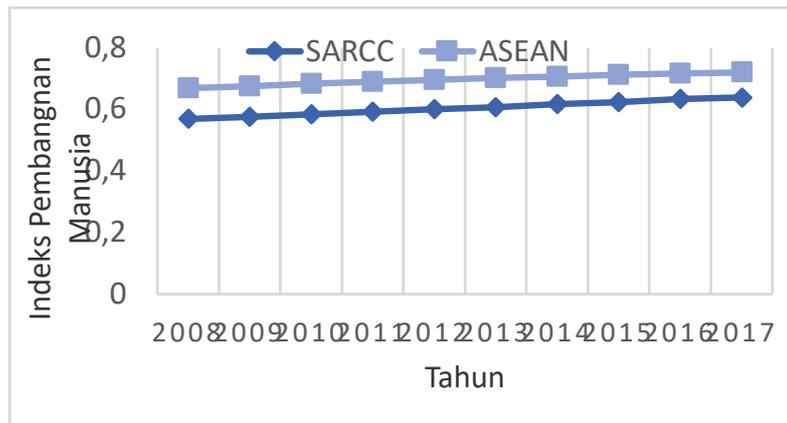
PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian proses yang mencakup berbagai perubahan mendasar pada struktur sosial, struktur ekonomi, perilaku masyarakat, dan institusi atau lembaga menjadi lebih baik, selain mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesenjangan pendapatan, serta pengentasan masalah kemiskinan (Todaro & Smith, 2006). Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, sebagaimana banyak diyakini oleh para ahli perencanaan pembangunan dan ekonomi mustahil dapat dilaksanakan tanpa upaya yang serius dalam membangun faktor manusianya (human capital) sebagaimana dijelaskan oleh Solow (Todaro & Smith, 2006).

United Nation Development Program (HDR, 2011) membuat indikator Indeks Pembangunan Manusia untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia. UNDP membedakan tingkat human development index berdasarkan empat klasifikasi yakni: low (IPM<50%), *lower-medium* (IPM antara 50% dan 65,99%), *upper-medium*

(IPM antara 66 dan 79,99) dan *high* (IPM 80 ke atas) (Ginting dkk., 2008). Tujuan pengukuran IPM yaitu membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih, memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana, dan menciptakan ukuran mencakup aspek sosial dan ekonomi (Wicaksono, 2014).

Gambar 1
Indeks Pembangunan Manusia ASEAN dan SAARC tahun 2008-2017



Sumber: *World Bank*, 2020

Berdasarkan Gambar 1 diatas menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia yang terjadi pada negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) dan SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) mengalami peningkatan hampir setiap tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi berhasil sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Tabel 1
Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia ASEAN dan SAARC
Tahun 2008-2017

ASEAN			SAARC		
Negara	Rata-Rata IPM	Kategori	Negara	Rata-Rata IPM	Kategori
Filipina	0.687	<i>Upper Medium</i>	Afghanistan	0.474	<i>Lower Medium</i>
Indonesia	0.681	<i>Upper Medium</i>	Bangladesh	0.567	<i>Lower Medium</i>
Vietnam	0.668	<i>Upper Medium</i>	Bhutan	0.587	<i>Lower Medium</i>
Laos	0.57	<i>Lower Medium</i>	India	0.604	<i>Lower Medium</i>
Myanmar	0.543	<i>Lower Medium</i>	Maldives	0.688	<i>Upper Medium</i>
Kamboja	0.55	<i>Lower Medium</i>	Pakistan	0.536	<i>Lower Medium</i>
Malaysia	0.784	<i>High</i>	Nepal	0.545	<i>Lower Medium</i>
Singapura	0.916	<i>High</i>	Sri Lanka	0.761	<i>High</i>
Thailand	0.735	<i>High</i>			
Brunei Darussalam	0.839	<i>High</i>			

Sumber: *World Bank*, 2020

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata IPM di ASEAN dan SAARC tahun 2008-2017 berbeda-beda, pembangunan manusia di kedua regional terdiri dari kategori *lower-medium*, *upper medium*, dan *high*. Walaupun ada peningkatan secara keseluruhan di negara ASEAN maupun SAARC tetapi masih ada kesenjangan di antara negara ASEAN maupun SAARC karena nilai yang berbeda-beda. Jika disimpulkan Indeks Pembangunan Manusia negara ASEAN dan SAARC didominasi oleh kategori *lower-medium* dan *upper-medium*.

Banyak faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia, salah satunya Teknologi dan komunikasi informasi (TIK) atau *Information Communication and Technology* (ICT). Secara Empiris dan teoritis studi telah mengungkapkan dampak besar ICT pada pembangunan ekonomi dan sosial. Literatur yang berkembang tentang topik tersebut telah mengakui pentingnya ICT untuk pembangunan dan peningkatan efisiensi organisasi dan proses pengembangan manusia (Tyworth, 2014). ICT telah membentuk ulang dunia dalam hal menghemat waktu dan uang, melampaui ruang dan kedekatan, serta meningkatkan akses ke informasi dan pendidikan. Akses ke informasi dan pengetahuan memberdayakan individu dengan mempengaruhi kemampuan belajar, daya pikir, dan kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain (Summak & Samancioğlu, 2011). Jika suatu negara ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, negara harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (Turner, 2011), selain peran teknologi, pemerintahan adalah elemen utama dalam pembangunan yang sejahtera di negara manapun, khususnya pemerintahan yang baik. Artinya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih baik, dalam perekonomian keberadaan *good governance* sangat penting terutama di negara berkembang. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ahmad & Saleem (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa indikator *good governance* memiliki peran penting dalam pembangunan manusia.

Norton (2002) menyatakan bahwa apabila pertumbuhan PDB per kapita tinggi berarti terdapat lebih banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, Secara ekonomi makro, PDB per kapita dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan PDB per kapita akan meningkatkan standar hidup layak masyarakat sehingga daya beli juga mengalami peningkatan. Peningkatan daya beli berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia melalui akses yang mudah dalam meningkatkan sumber daya manusianya. Seperti penelitian yang dilakukan Winarti (2014) dalam penelitiannya melihat Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia menunjukkan bahwa variabel PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, yang artinya ketika PDB meningkat pembangunan manusia juga ikut meningkat.

Dalam rangka mencapai peningkatan derajat, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan kesetaraan pembangunan ekonomi masing-masing organisasi regional yaitu negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) dan SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation), maka menjadi alasan dilakukannya penelitian ini. Dipilihnya kedua organisasi regional yaitu ASEAN dan SAARC karena memiliki kemiripan yaitu didominasi oleh negara kategori berkembang yang sedang melakukan fase transisi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Negara yang terpilih adalah negara dengan indeks

pembangunan manusia kategori *lower-upper medium* yang diharapkan dapat meningkatkan Indeks pembangunan manusia pada tingkat *high* sehingga dapat mencapai kesetaraan pembangunan ekonomi pada masing-masing regional. Kedua organisasi regional tersebut menarik perhatian peneliti untuk menjadikan dua organisasi regional tersebut sampel dalam penelitian ini dalam rangka melakukan perbandingan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Manusia

Pembangunan pada awalnya diarahkan dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai bentuk tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi di suatu negara, namun kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik khususnya pada negara-negara berkembang. Pada tahun 1990 UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam laporannya "*Global Human Development Report*" memperkenalkan konsep Pembangunan Manusia sebagai paradigma baru model pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai perluasan pilihan untuk manusia (*enlarging people's choice*), yang dapat dilihat sebagai upaya ke arah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang akan dicapai. Pembangunan manusia juga dapat dilihat sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan.

Salah satu alat ukur capaian pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut pandangan ekonom klasik mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang dan modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, (4) tingkat teknologi yang digunakan (Kuncoro, 2004). Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi.

Menurut (Sadono, 2000) alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Selain faktor produksi, jumlah angkatan kerja yang bekerja juga akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga apabila dimanfaatkan dengan maksimal maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi yaitu produk domestik bruto (PDB) atau produk domestik regional bruto per kapita (PDRB). *Gross domestic product* atau

Produk domestik bruto, merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh pekerja dan properti yang berada di suatu daerah, yang biasanya disebut negara. PDB dapat juga didefinisikan sebagai sebuah ukuran keseluruhan dari produksi total ekonomi sebuah negara, PDB mencerminkan nilai pasar untuk semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu Negara untuk suatu periode tertentu (Mahadana Learning, 2008).

Information, Communication and Technology

Teknologi Informasi (TI) dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan untuk dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Haag dan Keen dalam Kadir (2005) menyatakan bahwa Teknologi Informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. TI telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tidak hanya membantu bekerja dan melakukan tugas-tugas yang berkecimpung dalam dunia komputer saja, tetapi telah berkembang dalam bidang lainnya, seperti sains, perbankan, perpustakaan, teknik dan lain sebagainya. Setiawan (2009) menyatakan bahwa Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.

Penetrasi telekomunikasi yang tinggi akan mempermudah berbagai aktivitas manusia, mulai dari aktivitas ekonomi, bisnis, birokrasi pemerintahan, birokrasi, organisasi, industri, pendidikan dan sebagainya sehingga kualitas dan taraf hidup masyarakat dapat terakselerasi. Sebaliknya semakin rendah penetrasi telekomunikasi maka akan berpengaruh pada rendahnya aktivitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kualitas dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

ICT Development Index

Untuk melihat perkembangan teknologi disuatu negara, dapat melalui *Information Communication and Technology Development Index (IDI)*. *Information Communication and Technology Development Index (IDI)* merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan ICT. *Information Communication and Technology Development Index (IDI)* dikembangkan oleh *International Telecommunication Union (ITU)* dengan nama *Information Communication Technology (ICT) Development Index*. IDI disusun oleh sebelas indikator yang dikombinasikan menjadi suatu ukuran standar pembangunan ICT suatu wilayah dan dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah.

Ke-sebelas sektor tersebut dibagi lagi oleh 3 sub-indeks. Pertama, sub-indeks akses dan infrastruktur yang terdiri dari pelanggan telepon tetap per 100 penduduk, pelanggan telepon seluler per 100 penduduk, bandwidth internet internasional per pengguna, presentase rumah tangga yang menguasai komputer, Presentase rumah tangga yang memiliki akses internet. Kedua, sub-indeks penggunaan yang terdiri dari, presentase penduduk yang mengakses internet, pelanggan internet broadband tetap kabel per 100 penduduk, pelanggan internet broadband tanpa kabel per 100 penduduk. Ketiga sub-indeks Keahlian yang terdiri dari angka melek huruf angka partisipasi kasar

sekunder (SMP dan SMA / sederajat), angka partisipasi kasar tersier (pendidikan tinggi D1-S1)

Good Governance

Bank Dunia mensinonimkan *Good Governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frameworks* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan, sedangkan UNDP sendiri memberikan definisi *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara sektor swasta dan masyarakat (society).

Governance terdiri dari tradisi dan institusi dimana kewenangan di sebuah negara dilaksanakan. Ini termasuk proses dimana pemerintah yang dipilih, dipantau dan diganti; kapasitas pemerintah untuk secara efektif merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang sehat; dan rasa hormat dari warga negara dan negara untuk lembaga yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial di antara mereka (Kaufmann, 2010). Enam indikator tata pemerintahan yang baik, di antaranya adalah *voice and accountability, political stability and absence of violence or terrorism, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption*.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dari variabel penelitian berupa data sekunder dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang dibutuhkan adalah indeks pembangunan manusia, produk domestik bruto, *ICT development index, control of corruption, Political stability and absence of violence or terrorism, dan regulatory quality* pada tahun 2008-2017 dengan studi kasus 7 negara anggota SAARC dan 6 negara anggota ASEAN kategori IPM *lower-upper medium*. Data tersebut diperoleh dari *International Telecommunication Union ITU, World Bank & Worldwide Governance Indicators*.

Definisi Operasional

1. Pembangunan Manusia

Variabel yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia adalah indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia adalah ukuran capaian pembangunan manusia yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang mewakili bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang pembangunan untuk hidup layak. Indeks pembangunan manusia ini dinyatakan dalam satuan indeks.

2. Produk Domestik Bruto

PDB per kapita adalah produk domestik bruto dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDB merupakan jumlah nilai tambah bruto dari seluruh penduduk yang menghasilkan barang dan jasa dalam suatu perekonomian ditambah pajak produk dan dikurangi subsidi yang tidak termasuk dalam nilai produk. Data yang digunakan dinyatakan dengan harga konstan 2010 dalam dolar Amerika Serikat.

3. *ICT Development Index*

ICT development index adalah Suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah disusun oleh sebelas indikator yang dikombinasikan menjadi suatu ukuran standar pembangunan ICT suatu wilayah dan dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Ke-sebelas sektor tersebut dibagi lagi oleh 3 sub-indeks yaitu sub-indeks akses dan infrastruktur, sub-indeks penggunaan, dan sub-indeks keahlian. Data ini dinyatakan dalam satuan indeks.

4. *Control of Corruption*

Control of corruption adalah mengilustrasikan sejauh mana kedaulatan rakyat disalahgunakan demi keuntungan pribadi, meliputi bentuk korupsi kecil dan besar, serta “perampokan” negara oleh elite dan kepentingan pribadi. Data ini dinyatakan dalam satuan indeks.

5. *Political Stability and Absence of Violence or Terrorism*

Political stability and absence of violence or terrorism adalah Mengilustrasikan kemungkinan bahwa pemerintah akan tidak stabil atau digulingkan dengan cara inkonstitusional atau kekerasan, meliputi kekerasan bermotif politik maupun terorisme. Data ini dinyatakan dalam satuan indeks.

6. *Regulatory Quality*

Regulatory quality adalah mengilustrasikan tentang kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan dan peraturan yang sehat yang dimungkinkan serta mendorong pengembangan sektor swasta. Data ini dinyatakan dalam satuan indeks.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Metode yang digunakan adalah regresi data panel yang merupakan gabungan antara data *cross section* dan *time series*. Model regresi linier menggunakan data *cross section* dan *time series* sehingga model dituliskan sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 GDP_{it} + \beta_2 IDI_{it} + \beta_3 CC_{it} + \beta_4 PV_{it} + \beta_5 RQ_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Keterangan:

IPM_{it} : logaritma natural dari Indeks Pembangunan Manusia di negara I pada tahun t

GDP_{it} : produk domestik bruto per kapita di negara i pada tahun t

IDI_{it} : *ICT Development Index* di negara i pada tahun t

CC_{it} : *control of corruption* di negara i pada tahun t

PV_{it} : *political stability and absence of violence or terrorism* di negara i pada tahun t

RQ_{it} : *regulatory quality* di negara i pada tahun t

α_{it} : konstanta

β_n : koefisien

ε_{it} : *residual (error term)*

Pemilihan Model

Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan didapatkan teknik estimasi terbaik yang digunakan adalah *generalized least square*. Penelitian ini menggunakan

pembobotan GLS, yaitu *cross section SUR* (menggunakan estimasi *residual covariance matriks cross section*) karena terdeteksi adanya masalah heteroskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi dapat diabaikan karena menggunakan pembobotan GLS yang merupakan metode penyembuhan dalam masalah asumsi klasik (Gujarati, 2016). Variabel-variabel yang ditransformasikan dalam GLS memenuhi asumsi klasik dan menghasilkan estimator yang bersifat *BLUE* (Gujarati, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama sepuluh negara di Asia Tenggara ASEAN meliputi wilayah daratan seluas 4,46 juta km² atau setara dengan 3% total luas daratan di Bumi, dan memiliki populasi yang mendekati angka 600 juta orang atau setara dengan 8.8% total populasi dunia. Luas wilayah laut ASEAN tiga kali lipat dari luas wilayah daratan. Pada tahun 2010, kombinasi nominal GDP ASEAN telah tumbuh hingga \$1,8 triliun. Jika ASEAN adalah sebuah entitas tunggal, maka ASEAN akan duduk sebagai ekonomi terbesar kesembilan setelah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Jerman, Prancis, Brasil, Inggris, dan Italia.

SAARC (Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan atau South Asian Association for Regional Cooperation) adalah organisasi dalam lingkup internasional dan regional Asia Selatan. Saat ini SAARC terdiri dari delapan Negara Anggota yaitu Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan dan Sri Lanka yang mempresentasikan 3% wilayah dunia, 21% populasi dunia, dan 4,21% (US \$ 3,67 triliun) ekonomi global, per 2019.

Hasil Uji Deteksi Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji normalitas di negara ASEAN kategori *lower-upper medium* didapatkan nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0,390506 lebih besar dari α (0,05). Selain itu pada negara SAARC kategori *lower-upper medium* didapatkan nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0,259161 lebih besar dari α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas yang dilakukan dengan mendeteksi korelasi antar variabel independen dengan menggunakan matriks korelasi menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel bebas pada kedua regional kurang dari 0,90, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada variabel independen. Pada penelitian ini menggunakan model GLS yang dapat menghasilkan estimator yang bersifat *BLUE*. Model GLS merupakan metode penyembuhan dalam mengatasi masalah dalam asumsi heteroskedastisitas dan autokorelasi, sehingga asumsi heteroskedastisitas dan autokorelasi dapat (Gujarati, 2016).

Hasil Uji Statistik

Tabel 2
Hasil Estimasi Regresi ASEAN

Variabel Dependen	Variabel Independen	Koefisien	Prob. t- Statistik	Prob. F- statistik	Adj-R ²
IPM	PDB	3.39E-05	0.0000	0.000000	0.995623
	IDI	0.007769	0.0000		
	CC	-0.002702	0.2878		
	PV	0.011260	0.0000		
	RQ	0.018820	0.0000		

Sumber: Hasil Olah Data Eviews, 2020

Berdasarkan hasil uji *generalized least Square model*, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$IPM = 0.548207 + 3.39E-05 GDP + 0.007769 IDI + 0.011260 PV + 0.018820 RQ$$

Berdasarkan tabel *output* Eviews di atas, diperoleh nilai F statistik sebesar 1342.993 dengan probabilitas sebesar 0,000000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi Produk Domestik Bruto (GDP), *ICT Development Index (IDI)*, *control of corruption (CC)*, *political stability and absence of violence or terrorism (PV)*, dan *regulatory quality (RQ)* tidak sama dengan nol atau keempat variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini juga berarti bahwa nilai koefisien determinasi R² tidak sama dengan nol atau signifikan.

Hasil uji t statistik menunjukkan bahwa variabel independen Produk Domestik Bruto (GDP), *ICT Development Index (IDI)*, *political stability and absence of violence or terrorism (PV)*, dan *regulatory quality (RQ)* berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai signifikansi 0,05, sedangkan variabel *control of corruption (CC)*, tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) oleh karena memiliki probabilitas jauh di atas 0,05 yaitu sebesar 0,2878. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipengaruhi oleh GDP, IDI, CC, PV, dan RQ.

Tabel 3
Hasil Estimasi Regresi SAARC

Variabel Dependen	Variabel Independen	Koefisien	Prob. t- Statistik	Prob. F- statistik	Adj-R ²
IPM	PDB	0.112716	0.0000	0.000000	0.999112
	IDI	0.018059	0.0000		
	CC	-0.001922	0.4342		
	PV	0.004158	0.0031		
	RQ	-0.010027	0.0004		

Sumber: Hasil Olah Data Eviews, 2020

Berdasarkan hasil uji *generalized least Square model*, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$IPM = -0.290581 + 0.112716 GDP + 0.018059 IDI + 0.004158 PV - 0.010027 RQ$$

Berdasarkan tabel *output* EViews di atas, diperoleh nilai F statistik sebesar 7056.397 dengan probabilitas sebesar 0,000000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi lima variabel independen yaitu, Produk Domestik Bruto (GDP), *ICT Development Index (IDI)*, *control of corruption (CC)*, *political stability and absence of violence or terrorism (PV)*, dan *regulatory quality (RQ)*. Keempat variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini juga berarti bahwa nilai koefisien determinasi R^2 tidak sama dengan nol atau signifikan.

Hasil uji t statistik menunjukkan bahwa variabel independen yaitu produk domestik bruto (GDP) dan *ICT Development Index (IDI)*, *political stability and absence of violence or terrorism (PV)*, dan *regulatory quality (RQ)* berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai signifikansi jauh dibawah 0,05 yaitu nilai Prob sebesar 0,0000, 0,0004, dan 0,0031 sedangkan variabel *control of corruption (CC)* tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena memiliki probabilitas jauh di atas 0,05 yaitu sebesar 0.4342. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel Indeks pembangunan Manusia (IPM) dipengaruhi oleh Produk Domestik Bruto (GDP), *ICT Development Index (IDI)*, *political stability and absence of violence or terrorism (PV)*, dan *regulatory quality (RQ)*

Variabel produk domestik bruto per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan per kapita pada ASEAN dan SAARC. Kenaikan produk domestik bruto per kapita sebesar \$1 akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 3.39E-05 % pada ASEAN dengan asumsi *ceteris paribus* atau variabel lain tidak mengalami perubahan. Sedangkan pada SAARC, kenaikan produk domestik bruto per kapita sebesar \$1 akan menaikkan indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.112716% dengan asumsi *ceteris paribus* atau variabel lain tidak mengalami perubahan. Kedua regional memiliki pengaruh yang positif dan signifikan sejalan dengan Arsyad, 2010 bahwa pembangunan ekonomi adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan per kapita penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita menjadi ukuran yang lebih baik untuk mengukur standar hidup masyarakat di suatu negara (Mankiw, 2013). Semakin tinggi GDP per kapita suatu negara maka akan meningkatkan nilai IPM negara tersebut. Semakin tinggi GDP per kapita suatu negara maka akan meningkatkan pendapatan rumah tangga di negara tersebut dan selanjutnya akan meningkatkan daya beli rumah tangga tersebut. Ketika daya beli rumah tangga meningkat, maka peningkatan daya beli tersebut dapat dialokasikan kepada pembelian makanan yang bergizi, biaya pendidikan, maupun biaya kesehatan. Hal ini akan meningkatkan angka harapan hidup dan angka melek huruf di dalam rumah tangga tersebut. Yang nantinya hal ini akan turut meningkatkan nilai IPM di negara tersebut. Sejalan dengan penelitian (Hasan, 2013) menemukan korelasi positif antara HDI dan PDB, yaitu hubungan tersebut cenderung melemah pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan melihat bahwa daerah yang memiliki IPM di bawah rata-rata IPM nasional, menunjukkan bahwa variabel rata-rata belanja perkapita, jumlah penduduk, tingkat pengangguran, alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Variabel *ICT Development Index* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan per kapita pada ASEAN dan SAARC. Kenaikan *ICT*

Development Index sebesar 1% akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.007769% pada ASEAN dengan asumsi *ceteris paribus* atau variabel lain tidak mengalami perubahan. Sedangkan pada SAARC, kenaikan produk *ICT Development Index* sebesar 1% akan menaikkan indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.112716 % dengan asumsi *ceteris paribus* atau variabel lain tidak mengalami perubahan. Tinggi rendahnya infrastruktur telekomunikasi berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, Karena dengan adanya infrastruktur telekomunikasi yang baik maka dapat membuat pembangunan ekonomi yang diukur dengan indeks pembangunan manusia dalam penelitian ini juga baik. Infrastruktur telekomunikasi dapat membuat masyarakat memperoleh informasi dengan cepat dan berkomunikasi dengan masyarakat yang jauh lebih mudah. Sehingga dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di negara ASEAN maupun SAARC juga meningkat. Dengan adanya infrastruktur telekomunikasi masyarakat lebih produktif baik itu di sektor perdagangan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Barroso, 2020) bahwasannya telekomunikasi memiliki dampak terhadap pembangunan ekonomi. Menurut (Bandias, 2005) infrastruktur telekomunikasi berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di berbagai wilayah pedesaan terpencil di Australia. Telekomunikasi berguna untuk pengembangan masyarakat secara luas dan juga memiliki dampak terhadap pendidikan, kesehatan, bisnis dan juga sosial yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi di wilayah terpencil Australia.

Variabel *control of corruption* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada ASEAN dan SAARC. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwa variabel *World Government Indicator (WGI)* mempunyai hubungan yang positif. Jika dilihat dari karakteristik ASEAN dan SAARC kategori *lower-upper medium* yang diisi dengan negara berkembang, hasil ini menjadi relevan dengan penelitian yang dilakukan Tseng (2020) yang melihat pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Korupsi memang tidak memiliki hubungan langsung terhadap pembangunan manusia, tetapi mempunyai hubungan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi tinggi dan meningkat maka daya beli masyarakat juga ikut meningkat yang diharapkan daya beli tersebut dialokasikan kepada pembelian makanan yang bergizi, biaya pendidikan, maupun biaya kesehatan. Sehingga korupsi dapat mempengaruhi pembangunan manusia melalui daya beli yang dilihat dari tingginya pertumbuhan dan PDB suatu negara. Pada penelitian ini ditemukan hubungan yang lemah dan negatif antara korupsi dan pembangunan manusia dan hasilnya sama dengan penelitian Tseng (2020) yaitu penurunan korupsi di negara berkembang, tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi, sebaliknya disimpulkan bahwa tidak semua korupsi berdampak buruk pada perekonomian. Korupsi yang memiliki ciri “speed money” berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (FernándezTorres et al., 2018; Sasti & Latrini, 2019; Shabbir et al., 2016; Tseng, 2020)

Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik mempunyai hubungan. Di satu sisi, ketidakpastian terkait dengan lingkungan politik yang tidak stabil dapat menekan investasi dan laju pembangunan ekonomi. Ketidakstabilan politik dapat menyebabkan stagnasi atau penurunan ekonomi maupun membuat masyarakat apatis terhadap politik. Di sisi lain, kinerja ekonomi yang buruk dapat menyebabkan tumbanganya

pemerintah dan kekacauan politik. Stabilitas politik di suatu negara sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Aliran masuk investasi asing langsung juga peka terhadap “biaya transaksi investasi”, yang berarti bahwa lembaga keuangan internasional memilih negara di mana investor dapat memperoleh tingkat pengembalian finansial yang memadai atas investasi mereka (North, 1990) aliran masuk investasi asing langsung dipengaruhi oleh “keyakinan dan kepercayaan” investor terhadap kebijakan moneter dan fiskal pemerintah, maupun stabilitas makroekonomi mereka. Dengan demikian, sistem tata pemerintahan yang dilaksanakan dengan baik dianggap sebagai prasyarat untuk daya tarik investasi asing langsung (Lehnert et al., 2013). Pertumbuhan ekonomi tinggi membuat pembangunan meningkat sehingga komponen Indeks pembangunan Manusia juga meningkat (Dewi et al., 2016).

Variabel *regulatory quality* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indes Pembangunan Manusia pada ASEAN. Kenaikan *regulatory quality* sebesar 1 satuan akan meningkatkan terhadap Indes Pembangunan Manusia sebesar 0.018820% pada ASEAN dengan asumsi *ceteris paribus* atau variabel lain tidak mengalami perubahan. Karya teoritis terutama terinspirasi oleh studi ekonomi kelembagaan baru (North, 1990) menyatakan bahwa aturan hukum formal yang kuat memfasilitasi pertukaran ekonomi sehingga mendukung pembangunan ekonomi, karena lembaga formal yang mapan dapat melindungi hak milik dan kontrak sehingga meningkatkan pertukaran pasar, investasi dan inovasi dengan biaya yang cukup rendah. Untuk melindungi dari oportunistik dan untuk mengurangi ketidakpastian, kualitas regulasi, penegakan aturan dan sanksi yang efektif perlu dilaksanakan oleh pemerintah suatu negara dan diperkuat oleh kekuatan koersif negara untuk menegakkan aturan (Aron, 2000). Dengan demikian, akuntabilitas, kualitas regulasi, supremasi hukum, stabilitas politik, perlindungan hak milik dan penegakan kontrak, serta pengendalian korupsi merupakan aspek penting dari lembaga-lembaga pendorong pertumbuhan. Dari argumen teoritis ini menyiratkan bahwa lembaga formal yang tidak efisien tidak dapat mencegah biaya transaksi yang tinggi dan tidak dapat mendukung kegiatan swasta, pertukaran pasar, investasi, dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, pengaturan kelembagaan sangat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini meliputi banyak aspek salah satunya pembangunan manusia. Hasil ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya, (Jalilian dkk., 2007) menggunakan data WGI untuk mengukur kualitas regulasi di negara berkembang. Hasil regresi tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa kualitas regulasi memiliki pengaruh positif dan kausal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Variabel *regulatory quality* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indes Pembangunan Manusia pada SAARC. Kenaikan *regulatory quality* sebesar 1 satuan akan menurunkan terhadap Indes Pembangunan Manusia sebesar 0.010027 % pada ASEAN dengan asumsi *ceteris paribus* atau variabel lain tidak mengalami perubahan. Jika kita lihat *regulatory quality* di SAARC mempunyai tren yang stagnan dan tidak punya kenaikan yang signifikan dibanding dengan negara ASEAN, hal ini terjadi karena kualitas. *Regulatory quality* berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang perdagangan, investasi luar negeri, dan nilai tukar (Djankov et al., 2006). *Regulatory quality* tidak mempunyai hubungan langsung terhadap pembangunan manusia tetapi mempunyai hubungan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada

penelitian Nasrin & Khan(2016) menemukan bahwa kualitas regulasi berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi di Asia Selatan karena kualitas regulasi di Asia Selatan kurang baik atau terdapat *loop hole* dalam regulasi. Selain itu peraturan yang cenderung kaku dan panjang masih terjadi di negara-negara Asia Selatan. Sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan perlambatan pembangunan manusia. Hal ini yang menyebabkan *regulatory quality* di negara SAARC kategori *lower* belum mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan jika dibandingkan dengan negara ASEAN kategori *lower-medium*.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) dan SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) kategori *lower-upper medium* meliputi 6 negara anggota ASEAN dan 7 negara anggota SAARC selama periode 2008-2017. Dipilihnya kedua organisasi regional yaitu ASEAN dan SAARC karena memiliki kemiripan yaitu didominasi oleh negara kategori berkembang yang sedang melakukan fase transisi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Negara yang terpilih adalah negara dengan indeks pembangunan manusia kategori *lower-upper medium* yang diharapkan dapat meningkatkan Indeks pembangunan manusia pada tingkat *high* sehingga dapat mencapai kesetaraan pembangunan ekonomi pada masing-masing regional. Analisis ekonometrika dalam penelitian ini didasarkan pada model panel statis.

Pada negara ASEAN kategori *lower-upper Medium*, produk domestik bruto, *ICT development Index*, *political stability and absence of violence or terrorism* dan *regulatory quality* memiliki pengaruh yang signifikan dan positif secara statistik terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). *control of corruption* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.

Sementara itu, Pada negara SAARC kategori *lower-upper Medium*. variabel produk domestik bruto, *ICT development Index*, dan *political stability and absence of violence or terrorism* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Sedangkan variabel *regulatory quality* mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan secara statistik terhadap indeks pembangunan manusia di negara. Selain itu, variabel *control of corruption* memiliki pengaruh yang sama terhadap indeks pembangunan manusia dengan negara ASEAN kategori *lower-upper medium* yaitu mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan.

ASEAN dan SAARC terkhusus dengan Indeks Pembangunan Manusia kategori *lower-upper medium* memiliki variabel yang identik dan signifikan. Hasil yang banyak identik dan signifikan ini disebabkan karena kedua organisasi regional memiliki karakteristik yang sama sebagai negara berkembang yang sedang melakukan fase transisi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Perbedaan geografis tidak membawa perbedaan besar terhadap variabel yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di masing-masing regional

SARAN

Implikasi kebijakan yang dapat direkomendasikan, di antaranya adalah penelitian ini menemukan bahwa kenaikan produk domestik bruto dapat meningkatkan pembangunan Manusia pada ASEAN dan SAARC kategori *Lower-upper medium*. Hal ini menyiratkan bahwa perlunya memberikan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan negara ASEAN dan SAARC kategori *lower-upper medium*, ada banyak cara dalam meningkatkan pendapatan suatu negara, salah satunya dengan menekan jumlah penduduk, sebab peningkatan jumlah penduduk akan memperlambat kenaikan pendapatan suatu daerah.

Pada penelitian ini juga menemukan bahwa kenaikan teknologi informasi dan komunikasi di negara ASEAN dan SAARC kategori *lower-upper medium* juga menaikkan Indeks Pembangunan manusia di negara tersebut. Untuk mencapai peningkatan indeks pembangunan manusia di negara ASEAN dan SAARC kategori *lower-upper medium*. Perlu mendorong kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan teknologi, informasi dan komunikasi. Seperti, mempermudah akses internet dan pemerataan penggunaan telepon seluler karena media tersebut dapat mempengaruhi hasil pembangunan yang lebih baik, baik di individu maupun di tingkat tinggi. ICT dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi yang andal, tepat waktu, di sisi lain pemerintah membuat penilaian yang baik dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dalam peningkatan pembangunan manusia.

Kualitas lembaga politik juga memiliki peran dalam pembangunan manusia. Peran organisasi regional seperti ASEAN dan SAARC perlu diperkuat guna mendukung tujuan pembangunan manusia yang baik. Sebagaimana hal tersebut, strategi nasional guna mendorong tata pemerintahan yang baik dan memerangi korupsi merupakan syarat utama dalam pembangunan ekonomi negara-negara anggota ASEAN dan SAARC, walaupun hasil yang tidak signifikan dan negatif pada variabel korupsi terhadap pembangunan manusia, tetapi penelitian lain banyak didominasi oleh efek yang buruk antara korupsi dan pembangunan. Pemerintah perlu lebih hati-hati dalam memberantas korupsi, jangan sampai pemberantasan dilakukan malah memperlambat pembangunan, maka perlu menyediakan alternatif-alternatif yang efektif.

Selain itu kualitas regulasi yang baik juga mempengaruhi pembangunan, regulasi-regulasi yang efektif diperlukan agar investasi terhadap negara ASEAN dan terutama SAARC kategori *lower-upper medium* juga meningkat. Peraturan kaku dan panjang perlu diperbaiki di negara-negara Asia Selatan. Untuk pengembangan sektor swasta, pemerintah harus membuat regulasi yang kualitatif, mudah dan hemat waktu untuk mengamankan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi sehingga pembangunan manusia juga meningkat.

Tanpa stabilitas politik, program pembangunan yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan kerap urung terlaksana. Harus diakui, peran tata pemerintahan dalam memengaruhi pembangunan manusia sangat relevan. Oleh karena itu, perbaikan pada lembaga politik dan kebijakan terhadap pembangunan manusia harus berjalan beriringan. Di sinilah aspek peraturan terhadap ketaatan perlu dijalankan, salah satunya menjalankan CSR (Corporate Social Responsibility) terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Saran untuk penelitian yang akan datang, di antaranya adalah penambahan variabel lain di luar penelitian ini, yang dianggap menjadi determinan pembangunan

manusia perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu juga perlu dilakukan penelitian mendalam pada masing-masing negara guna mendapatkan hasil yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi pembangunan manusia.

REFERENSI

- Ahmad, Z., & Saleem, A. (2014). Impact of governance on human development. *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS)*, 8(3), 612–628.
- Bandias, S., & Ram Vemuri, S. (2005). Telecommunications infrastructure facilitating sustainable development of rural and remote communities in Northern Australia. *Telecommunications Policy*, 29(2), 237–249. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.telpol.2004.11.008>
- Cebula, R., Clark, J., & Mixon, F. (2013). The impact of economic freedom on per capita real GDP: A study of OECD nations. *Journal of Regional Analysis and Policy*, 43, 34–41.
- Centre, M. L. (2008). *Dow theory. Tersedia :*
- Dewi, N., Yusuf, Y., & Iyan, R. (2016). Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 870–882.
- Djankov, S., McLiesh, C., & Ramalho, R. M. (2006). Regulation and growth. *Economics Letters*, 92(3), 395–401. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.econlet.2006.03.021>
- Gómez-Barroso, J. L., & Marbán-Flores, R. (2020). Telecommunications and economic development – The 20th century: The building of an evidence base. *Telecommunications Policy*, 44(2), 101904. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.telpol.2019.101904>
- Gujarati. (2016). *Ekonometrika*.
- Hasan, Z. (2013). DETERMINANTS OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT: AN EMPIRICAL ANALYSIS. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 8(2). <https://journals.iium.edu.my/enmjjournal/index.php/enmj/article/view/62>
- Kaufmann, D. (2010). *The Worldwide Governance Indicators Methodology and Analytical Issues*.
- Kuncoro. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah*.
- Lehnert, K., Benmamoun, M., & Zhao, H. (2013). FDI Inflow and Human Development: Analysis of FDI's Impact on Host Countries' Social Welfare and Infrastructure. *Thunderbird International Business Review*, 55. <https://doi.org/10.1002/tie.21544>
- Lincoln, A. (2010). Ekonomi Pembangunan, Edisi Ketiga. *STIE YKPN. Yogyakarta*.
- Mankiw. (2013). Mankiw Principles of Economics. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Nasrin, N., & Khan, N. N. (2016). Governance and economic growth: evidence from South Asian countries. *African J. of Economic and Sustainable Development*, 5(4), 365. <https://doi.org/10.1504/ajesd.2016.079445>
- Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi Modern. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.



- Summak, M. S., & Samancıoğlu, M. (2011). Assessment of technology integration in vocational education and training schools Gaziantep University , Turkey. *Journal of Education*, 7(1), 68–85.
- Today, M. P., & Smith, S. C. (2006). Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan). In *Diterjemahkan oleh Drs Haris Munandar, MA dan Puji AL, SE dari Buku Economic Development Ninth Edition. Jakarta: Erlangga.*
- Turner, K. (2011). No Title. *The Importance of Good Governance in Achieving Economic Growth for Developing Nations: An Analysis of Sub-Saharan Africa, Bryant Economic Research Paper*, 4(4).
- Tyworth, M. (2014). Organizational identity and information systems: how organizational ICT reflect who an organization is. *European Journal of Information Systems*, 23(1), 69–83. <https://doi.org/10.1057/ejis.2013.32>
- United Nation Development Programmer. (n.d.). *Human Development Report 2008-2017.*
- Wicaksono, M. N. (2014). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Angkatan Kerja, dan Belanja Modal Daerah terhadap Peningkatan PDRB Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(1).
- Winarti. (2014). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, Dan Pdb Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 1992-2012. *Universitas Diponegoro*, 1–72.